



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 22323

Kode Pos 70814

Pelaihari, 1 Juli 2024

Kepada Yth.

**Pj. Bupati Tanah Laut**

di-

Pelaihari

**SURAT PENGANTAR**

**Nomor : 500.16.1/ 228 -DIP/DPMPSTP**

| No. | Jenis Surat yang dikirim  | Banyaknya       | Keterangan   |
|-----|---|-----------------|--|
| 1.  | Laporan Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Bulan April – Juni Tahun 2024 (Triwulan II) | 1 (Satu) Berkas | Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan selanjutnya. |

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Tanah Laut,




**H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710224 199702 1 003

Tembusan :

Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN  
BULAN APRIL - JUNI TAHUN 2024  
TRIWULAN II

| No | Tanggal Pengaduan | Masalah yang Diadukan Masyarakat                         | Solusi yang Diambil                            | Keterangan  |
|----|-------------------|--|--|---|
| 1. | 27 Mei 2024       | Pelaporan Adanya Temuan PKKPR PT.Kawasan Industri Jorong | Mengadakan rapat koordinasi (berkas terlampir) |  |

Pelaihari, 1 Juli 2024  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Tanah Laut,



**H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710224 199702 1 003



# PT WAHYU PUTRA RAMADHAN

Jl. A Yani km 122, Desa/Kelurahan Simpang Empat Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70881

## Kawasan Industri Jorong

Jorong , 27 Mei 2024

Nomor : 25/WPR-KI/V/2024

Lampiran : 2

Hal : **Pelaporan Adanya Temuan PKKPR PT.  
Kawasan Industri Jorong**

Kepada

Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal &  
PTSP (DPMPTSP) Kab. Tanah  
Laut

di Tempat

Dengan Hormat,

Kami atas nama pengelola Kawasan Industri Jorong PT. Wahyu Putra Ramadhan ingin melaporkan bahwa adanya temuan yaitu terbitnya perizinan PKKPR di Kawasan Industri Jorong yang beratas namakan PT. Kawasan Industri Jorong dengan Nomor (30042410216301006) luasan lahan yang dimohon 384 Ha, berdasarkan hasil analisa dari nomor PKKPR PT. Kawasan Industri Jorong titik koordinat untuk lahan yang dimohon terdapat tumpang tindih dengan lahan PKKPR PT. Wahyu Putra Ramadhan di Kawasan Industri Jorong. Dimana mengingat bahwa pengelola Kawasan Industri Jorong merupakan PT. Wahyu Putra Ramadhan dibuktikan dengan izin nomor PKKPR (Pf/502-II-200/IV/2023). Kami selaku pengelola Kawasan Industri Jorong memohon Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Tanah Laut untuk dapat memfasilitasi tindak lanjut terkait temuan tersebut, Dimana dokumen yang dimaksud terdapat pada lampiran pada surat ini.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur  


Muhammad Tarmadi



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30042410216301006

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT KAWASAN INDUSTRI JORONG  
NPWP : 95.485.119.2-732.000  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani Km 100, Desa/Kelurahan Jorong, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
No. Telepon : 081383710001  
Email : kawasanindustri.jorong@gmail.com  
Status Penanaman Modal : PMDN  
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68130  
Judul KBLI : Kawasan Industri  
Skala Usaha : Usaha Besar  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Jl. Ahmad Yani KM 100, RT.002 RW.001  
b. Kawasan : -  
c. Desa/Kelurahan : Jorong  
d. Kecamatan : Jorong  
e. Kabupaten/Kota : Kabupaten Tanah Laut  
f. Provinsi : Kalimantan Selatan  
g. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran  
Luas tanah yang dimohon : 384 Ha

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
  - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
  - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 April 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30042410216301006

Tabel Koordinat yang dimohonkan

| No. | Lintang     | Bujur      |
|-----|-------------|------------|
| 1   | 115.0152259 | -4.0076769 |
| 2   | 115.0160628 | -4.0066922 |
| 3   | 115.0163632 | -4.0056862 |
| 4   | 115.0154834 | -4.0037811 |
| 5   | 115.0143676 | -4.0053009 |
| 6   | 115.0117283 | -4.0060073 |
| 7   | 115.0098401 | -4.0068206 |
| 8   | 115.0084453 | -4.0069491 |
| 9   | 115.0076514 | -4.005729  |
| 10  | 115.0089174 | -4.0048514 |
| 11  | 115.0105482 | -4.0038453 |
| 12  | 115.0124794 | -4.0029677 |
| 13  | 115.014432  | -4.0019831 |
| 14  | 115.015183  | -4.0012125 |
| 15  | 115.0171571 | -4.0025396 |
| 16  | 115.0177579 | -4.0034172 |
| 17  | 115.0176292 | -4.0045089 |
| 18  | 115.0178438 | -4.0055791 |
| 19  | 115.0176936 | -4.0061357 |
| 20  | 115.0178223 | -4.0068849 |
| 21  | 115.0182944 | -4.0075912 |
| 22  | 115.0180154 | -4.0077197 |
| 23  | 115.0168996 | -4.0080407 |
| 24  | 115.0154405 | -4.0083404 |
| 25  | 115.0152259 | -4.0076769 |



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**Keterangan**

-  PKKPR PT. Wahyu Putra Ramadhan
-  PKKPR PT. Kawasan Industri Jorong



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

Pelaihari, 5 Juni 2024

Nomor : 500.16.7.2/180/PNPT  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat Laporan  
Temuan PKKPR pada Kawasan  
Industri Jorong

Kepada Yth.  
.....  
.....

Di-

Tempat

Sehubungan surat PT. Wahyu Putra Ramadhan Nomor 25/WPR-KI/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pelaporan Adanya Temuan PKKPR PT. Kawasan Industri Jorong, maka berkenaan dengan hal tersebut dan dalam upaya proses penyelesaian indikasi tumpang tindih lahan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha pada Kawasan Industri Jorong, dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk berhadir dalam rangka membahas hal tersebut dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Juni 2024

Waktu : 09.00 Wita – selesai

Tempat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. Plt. Kepala Dinas  
Sekretaris,

**IRMA ROSANTI, S.Sos, M.I.Kom**  
NIP. 19730225 20064 2 006



Lampiran

Surat No : 500.16.7.2/180/PNPT

Perihal : Undangan Rapat Laporan Temuan PKKPR pada Kawasan Industri Jorong

Daftar undang :

1. Kantor ATR/ BPN Kab. Tanah Laut.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut
3. Bidang Tata Ruang Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut.
4. Bidang Tata Lingkungan Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut.



## PT WAHYU PUTRA RAMADHAN

Jl. A Yani km 122, Desa/Kelurahan Simpang Empat Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70881

### Kawasan Industri Jorong

Nomor : 25/WPR-KI/V/2024

Lampiran : 2

Hal : **Pelaporan Adanya Temuan PKKPR PT.  
Kawasan Industri Jorong**

Jorong , 27 Mei 2024

Kepada

Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal &  
PTSP (DPMPTSP) Kab. Tanah  
Laut

di Tempat

Dengan Hormat,

Kami atas nama pengelola Kawasan Industri Jorong PT. Wahyu Putra Ramadhan ingin melaporkan bahwa adanya temuan yaitu terbitnya perizinan PKKPR di Kawasan Industri Jorong yang beratas namakan PT. Kawasan Industri Jorong dengan Nomor (30042410216301006) luasan lahan yang dimohon 384 Ha, berdasarkan hasil analisa dari nomor PKKPR PT. Kawasan Industri Jorong titik koordinat untuk lahan yang dimohon terdapat tumpang tindih dengan lahan PKKPR PT. Wahyu Putra Ramadhan di Kawasan Industri Jorong. Dimana mengingat bahwa pengelola Kawasan Industri Jorong merupakan PT. Wahyu Putra Ramadhan dibuktikan dengan izin nomor PKKPR (Pf/502-II-200/IV/2023). Kami selaku pengelola Kawasan Industri Jorong memohon Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Tanah Laut untuk dapat memfasilitasi tindak lanjut terkait temuan tersebut, Dimana dokumen yang dimaksud terdapat pada lampiran pada surat ini.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur

Muhammad Tarmadi



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0109220000075**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

: PT KAWASAN INDUSTRI JORONG  
: Jl. Ahmad Yani Km 100, Desa/Kelurahan Jorong, Kec. Jorong, Kab. Tanah  
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan,  
Kode Pos: 70881  
: 081383710001  
: kawasanindustri.jorong@gmail.com  
: PMDN  
: Lihat Lampiran

- No. Telepon
- Email
3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 September 2022  
Perubahan ke-1, tanggal: 1 September 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0109220000075**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI       | Lokasi Usaha  | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |   |   |
|-----|-----------|------------------|---|----------------|--------------------|---|---|
|     |           |                  |   |                | Jenis              | Status  | Keterangan  |
| 1   | 68130     | Kawasan Industri | Jl. Ahmad Yani KM 100, RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Jorong, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan<br>Kode Pos: 70881 | Tinggi         | NIB Izin           | Terbit<br>- Belum Terbit<br>- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | -<br>Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESesuaIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30042410216301006

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT KAWASAN INDUSTRI JORONG  
NPWP : 95.485.119.2-732.000  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani Km 100, Desa/Kelurahan Jorong, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
No. Telepon : 081383710001  
Email : kawasanindustri.jorong@gmail.com  
Status Penanaman Modal : PMDN  
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68130  
Judul KBLI : Kawasan Industri  
Skala Usaha : Usaha Besar  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Jl. Ahmad Yani KM 100, RT.002 RW.001  
b. Kawasan : -  
c. Desa/Kelurahan : Jorong  
d. Kecamatan : Jorong  
e. Kabupaten/Kota : Kabupaten Tanah Laut  
f. Provinsi : Kalimantan Selatan  
g. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran  
Luas tanah yang dimohon : 384 Ha

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu
  - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
  - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 April 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30042410216301006

Tabel Koordinat yang dimohonkan

| No. | Lintang     | Bujur      |
|-----|-------------|------------|
| 1   | 115.0152259 | -4.0076769 |
| 2   | 115.0160628 | -4.0066922 |
| 3   | 115.0163632 | -4.0056862 |
| 4   | 115.0154834 | -4.0037811 |
| 5   | 115.0143676 | -4.0053009 |
| 6   | 115.0117283 | -4.0060073 |
| 7   | 115.0098401 | -4.0068206 |
| 8   | 115.0084453 | -4.0069491 |
| 9   | 115.0076514 | -4.005729  |
| 10  | 115.0089174 | -4.0048514 |
| 11  | 115.0105482 | -4.0038453 |
| 12  | 115.0124794 | -4.0029677 |
| 13  | 115.014432  | -4.0019831 |
| 14  | 115.015183  | -4.0012125 |
| 15  | 115.0171571 | -4.0025396 |
| 16  | 115.0177579 | -4.0034172 |
| 17  | 115.0176292 | -4.0045089 |
| 18  | 115.0178438 | -4.0055791 |
| 19  | 115.0176936 | -4.0061357 |
| 20  | 115.0178223 | -4.0068849 |
| 21  | 115.0182944 | -4.0075912 |
| 22  | 115.0180154 | -4.0077197 |
| 23  | 115.0168996 | -4.0080407 |
| 24  | 115.0154405 | -4.0083404 |
| 25  | 115.0152259 | -4.0076769 |





1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







**Keterangan**

-  PKKPR PT. Wahyu Putra Ramadhan
-  PKKPR PT. Kawasan Industri Jorong





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 10072310316301001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT WAHYU PUTRA RAMADHAN
2. NPWP : 71.219.691.4-732.000
3. Alamat Kantor : Jl. A Yani km 124, Desa/Kelurahan Simpang Empat Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
- No. Telepon : 08121883807
- Email : ptwahyuputraramadhan@wprgroup.co.id
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68130
6. Judul KBLI : Kawasan Industri
7. Skala Usaha : Usaha Besar
8. Lokasi Usaha
  - a. Alamat : Jl. Ahmad Yani Km 107
  - b. Desa/Kelurahan : Swarangan
  - c. Kecamatan : Jorong
  - d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Tanah Laut
  - e. Provinsi : Kalimantan Selatan
  - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon : 9.692.360,69 M<sup>2</sup>

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 9.692.360,69 M<sup>2</sup>
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68130
5. Judul KBLI : Kawasan Industri
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : -
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum : -
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : -
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : -
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
  - a. Garis Sempadan Bangunan minimum : -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Penzinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- b. Jarak Bebas Bangunan minimum :-
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum :-
- d. Koefisien Tapak Basement minimum :-
- e. Jaringan Utilitas Kota :-

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah - tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Nomor -

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal:

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 10072310316301001

Tabel Koordinat yang dimohonkan

| No. | Lintang           | Bujur            |
|-----|-------------------|------------------|
| 1   | -3.98522582473917 | 115.054435117962 |
| 2   | -3.98522626156492 | 115.054435165553 |
| 3   | -3.99070490028644 | 115.054907278803 |
| 4   | -3.99097118167179 | 115.054325138944 |
| 5   | -3.99097906326348 | 115.054308369805 |
| 6   | -3.99151345964509 | 115.053201159523 |
| 7   | -3.9915588303801  | 115.053092950374 |
| 8   | -3.99155141967567 | 115.053089461062 |
| 9   | -3.99100590156063 | 115.052832617399 |
| 10  | -3.99045285788276 | 115.052742323969 |
| 11  | -3.99036778078337 | 115.052728433414 |
| 12  | -3.9903063405353  | 115.052718402685 |
| 13  | -3.9904062771899  | 115.052418589381 |
| 14  | -3.99050497840663 | 115.052310800337 |
| 15  | -3.99056161485374 | 115.052248949566 |
| 16  | -3.99107300272554 | 115.051690475098 |
| 17  | -3.99079117899019 | 115.051681081073 |
| 18  | -3.99083670181326 | 115.051568470003 |
| 19  | -3.99125750830104 | 115.050527528101 |
| 20  | -3.99180314664944 | 115.050671116708 |
| 21  | -3.99181311770059 | 115.050673741042 |
| 22  | -3.99216170367608 | 115.050765473933 |
| 23  | -3.99218549825934 | 115.050598911449 |
| 24  | -3.99246544667995 | 115.050125153632 |
| 25  | -3.99249482850483 | 115.050075430384 |
| 26  | -3.99272045708346 | 115.050201362165 |
| 27  | -3.99290913941544 | 115.050306673683 |
| 28  | -3.9929556529988  | 115.050235908937 |
| 29  | -3.99335921534663 | 115.049466672932 |
| 30  | -3.99363574716522 | 115.048798841478 |
| 31  | -3.99379150472117 | 115.048224787882 |
| 32  | -3.99381157579838 | 115.048160490429 |
| 33  | -3.99383642666239 | 115.048097870689 |
| 34  | -3.99386591800767 | 115.04803728102  |
| 35  | -3.99419409477383 | 115.047422833454 |
| 36  | -3.99453455920447 | 115.046781809455 |
| 37  | -3.99496323524407 | 115.045797796714 |
| 38  | -3.99499643967583 | 115.045729608399 |
| 39  | -3.99501218949301 | 115.045701669991 |
| 40  | -3.99528192070189 | 115.045242579604 |
| 41  | -3.99622639759991 | 115.04333643067  |
| 42  | -3.99635479955615 | 115.043029491135 |
| 43  | -3.99714303267076 | 115.041145254838 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| 44  | -3.99714626666049 | 115.041137622294 |
| 45  | -3.99715784045301 | 115.041111792358 |
| 46  | -3.99744153832194 | 115.040504511965 |
| 47  | -3.99776308480659 | 115.039816211944 |
| 48  | -3.99801689515579 | 115.039038437014 |
| 49  | -3.99802753974006 | 115.039009740815 |
| 50  | -3.99804166992902 | 115.038971646826 |
| 51  | -3.99843810347638 | 115.038020686056 |
| 52  | -3.99876321463861 | 115.037198584489 |
| 53  | -3.99877172898858 | 115.03717782071  |
| 54  | -3.99937276943837 | 115.035762675914 |
| 55  | -3.99970435505664 | 115.034792086152 |
| 56  | -3.99971402097443 | 115.03476520279  |
| 57  | -3.99992376387526 | 115.034209816635 |
| 58  | -4.00007058889921 | 115.033821032644 |
| 59  | -4.00008545317309 | 115.033784167568 |
| 60  | -4.00009362664039 | 115.0337657031   |
| 61  | -4.00031393976708 | 115.033282754227 |
| 62  | -4.00051869339137 | 115.032776353733 |
| 63  | -4.00080213649161 | 115.03205152902  |
| 64  | -4.00081324840723 | 115.032024426997 |
| 65  | -4.00082230415457 | 115.032004035509 |
| 66  | -4.00092240072884 | 115.031785978931 |
| 67  | -4.00113713480015 | 115.031318190809 |
| 68  | -4.00133966593999 | 115.030776446538 |
| 69  | -4.00135585537571 | 115.030736147998 |
| 70  | -4.00165068738843 | 115.03005220796  |
| 71  | -4.00185570956558 | 115.029576604348 |
| 72  | -4.00186655357677 | 115.029552436192 |
| 73  | -4.00237596572259 | 115.028460647207 |
| 74  | -4.00312810721767 | 115.026739515003 |
| 75  | -4.00337502589318 | 115.026174460907 |
| 76  | -4.00400310214796 | 115.024737157106 |
| 77  | -4.00403769967301 | 115.024666575067 |
| 78  | -4.00407836565723 | 115.024599277263 |
| 79  | -4.00412478851423 | 115.024535780325 |
| 80  | -4.00432352008579 | 115.024042847302 |
| 81  | -4.00443672510094 | 115.023600046036 |
| 82  | -4.00445299363541 | 115.023544070696 |
| 83  | -4.00447740168811 | 115.02347815784  |
| 84  | -4.00451450981523 | 115.023388869973 |
| 85  | -4.00469145662766 | 115.022963107364 |
| 86  | -4.00469549222927 | 115.02295355423  |
| 87  | -4.00473088175651 | 115.022880435801 |
| 88  | -4.0049789608258  | 115.022422751398 |
| 89  | -4.00527415711425 | 115.02169623359  |
| 90  | -4.00527948223157 | 115.021683412772 |
| 91  | -4.00556562844541 | 115.021009311767 |
| 92  | -4.00558108962627 | 115.020975091067 |
| 93  | -4.00573817879585 | 115.020645980498 |
| 94  | -4.00575854707835 | 115.020605920189 |
| 95  | -4.00578476604835 | 115.020560615825 |
| 96  | -4.00593183049253 | 115.020322774501 |
| 97  | -4.00597322751111 | 115.020221972704 |
| 98  | -4.00554147438728 | 115.019996974524 |
| 99  | -4.00526539543318 | 115.019853103067 |
| 100 | -4.00621718012395 | 115.017625927692 |
| 101 | -4.0068070149386  | 115.017863393082 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| 102 | -4.00702930987288 | 115.017952888455 |
| 103 | -4.00790649804556 | 115.016086265918 |
| 104 | -4.00791022938244 | 115.016078425896 |
| 105 | -4.0081050354405  | 115.01567410375  |
| 106 | -4.00930978830431 | 115.013173629326 |
| 107 | -4.0093193542607  | 115.013154370781 |
| 108 | -4.00970970990545 | 115.012391518819 |
| 109 | -4.01018017235982 | 115.011472119596 |
| 110 | -4.01059123171879 | 115.010554483993 |
| 111 | -4.01016002464811 | 115.010341997222 |
| 112 | -4.00761698662674 | 115.009088856662 |
| 113 | -4.00620605013114 | 115.008348570822 |
| 114 | -4.00640368874977 | 115.007829275808 |
| 115 | -4.00660814978706 | 115.007407103155 |
| 116 | -4.00667136304735 | 115.007386443575 |
| 117 | -4.00689202728094 | 115.007433979226 |
| 118 | -4.00763077229832 | 115.007761977905 |
| 119 | -4.00772843618475 | 115.007794315956 |
| 120 | -4.00782785704861 | 115.007820821983 |
| 121 | -4.00792868204543 | 115.007841402304 |
| 122 | -4.00803055747257 | 115.007855982145 |
| 123 | -4.00813312245787 | 115.007864512861 |
| 124 | -4.00823601526444 | 115.007866962012 |
| 125 | -4.00827446933168 | 115.007791057398 |
| 126 | -4.00909533645693 | 115.006170756697 |
| 127 | -4.00918142987055 | 115.006216339253 |
| 128 | -4.00919024927345 | 115.00622131646  |
| 129 | -4.00927243152463 | 115.006267699884 |
| 130 | -4.00927410015947 | 115.006268642078 |
| 131 | -4.00978869761513 | 115.006559074701 |
| 132 | -4.01006191267727 | 115.006713274211 |
| 133 | -4.01022370500339 | 115.006804588017 |
| 134 | -4.01067317062089 | 115.007058261215 |
| 135 | -4.01075932575569 | 115.007106885937 |
| 136 | -4.011639083734   | 115.007600457679 |
| 137 | -4.01189776764284 | 115.007737671353 |
| 138 | -4.01236396716928 | 115.006654773149 |
| 139 | -4.01238772682302 | 115.006604015547 |
| 140 | -4.01244140339284 | 115.006498095424 |
| 141 | -4.01333049117169 | 115.004743675675 |
| 142 | -4.01334147122391 | 115.004722700261 |
| 143 | -4.0133653528102  | 115.00468119493  |
| 144 | -4.01378362598276 | 115.003997157667 |
| 145 | -4.01399084270251 | 115.003620995538 |
| 146 | -4.01419511798322 | 115.003197983024 |
| 147 | -4.01473832847528 | 115.00208075033  |
| 148 | -4.01475034305458 | 115.002056947134 |
| 149 | -4.01542302806403 | 115.000772027111 |
| 150 | -4.0156382271491  | 115.000360966827 |
| 151 | -4.0156419376919  | 115.000353955067 |
| 152 | -4.01633333138471 | 114.999061251135 |
| 153 | -4.0162551230965  | 114.999046720496 |
| 154 | -4.01589730979939 | 114.998998799263 |
| 155 | -4.01575398315655 | 114.99897960334  |
| 156 | -4.01518701217819 | 114.998903670272 |
| 157 | -4.01513501123811 | 114.998888045799 |
| 158 | -4.01499502618003 | 114.998845985201 |
| 159 | -4.01316144429855 | 114.998295061928 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| 160 | -4.01245565353158 | 114.998082997182 |
| 161 | -4.01157725884412 | 114.997819071354 |
| 162 | -4.00977226790489 | 114.99736379677  |
| 163 | -4.00919357345375 | 114.997309161    |
| 164 | -4.00857449962806 | 114.998964980357 |
| 165 | -4.00649722335873 | 115.000159617462 |
| 166 | -4.00570500402767 | 115.00118510176  |
| 167 | -4.0057071816666  | 115.001198220355 |
| 168 | -4.00574531941438 | 115.001254840375 |
| 169 | -4.00581025955817 | 115.001641690161 |
| 170 | -4.00563056997846 | 115.001903520029 |
| 171 | -4.00505241983344 | 115.002023040563 |
| 172 | -4.00478993979901 | 115.001961160499 |
| 173 | -4.0041571999235  | 115.002008800551 |
| 174 | -4.00368955933189 | 115.001303631678 |
| 175 | -4.00348325487675 | 115.001319164732 |
| 176 | -4.0028462380191  | 115.000358582832 |
| 177 | -4.00230074569441 | 114.999407974741 |
| 178 | -4.00160230367178 | 114.998762314074 |
| 179 | -4.00147997896476 | 114.998683880022 |
| 180 | -4.00117776773686 | 114.998619706102 |
| 181 | -4.00092592430647 | 114.998512750608 |
| 182 | -4.00065969088399 | 114.99832022977  |
| 183 | -4.00043662972276 | 114.998120579112 |
| 184 | -4.00025674204303 | 114.997899536869 |
| 185 | -4.00002648547652 | 114.997557277387 |
| 186 | -3.99984659829204 | 114.997371887517 |
| 187 | -3.99968110170125 | 114.997307714135 |
| 188 | -3.999587560139   | 114.997272062343 |
| 189 | -3.99952484063595 | 114.997260794295 |
| 190 | -3.99948961949436 | 114.997274980419 |
| 191 | -3.99944883804657 | 114.997247139386 |
| 192 | -3.99933619730022 | 114.997226903095 |
| 193 | -3.99920188127875 | 114.997160352831 |
| 194 | -3.99906276767509 | 114.997065280871 |
| 195 | -3.99895243682624 | 114.997027251661 |
| 196 | -3.99891211429217 | 114.997035425321 |
| 197 | -3.99887383989914 | 114.997052570042 |
| 198 | -3.9988266164173  | 114.99705275495  |
| 199 | -3.99874136886304 | 114.997070034446 |
| 200 | -3.99857827119398 | 114.99716986012  |
| 201 | -3.99841517270634 | 114.997188874441 |
| 202 | -3.99817052604722 | 114.997172236632 |
| 203 | -3.99799423644442 | 114.997143715382 |
| 204 | -3.99781794693732 | 114.997083106409 |
| 205 | -3.99775755916576 | 114.997027508036 |
| 206 | -3.99770289946537 | 114.997030770197 |
| 207 | -3.99762564435416 | 114.996980431843 |
| 208 | -3.9987575801396  | 115.00647851452  |
| 209 | -3.99876062426543 | 115.00650405885  |
| 210 | -3.99890237363636 | 115.007693474273 |
| 211 | -3.99879884520891 | 115.0100290248   |
| 212 | -3.99960367368415 | 115.010376374327 |
| 213 | -3.99961806442994 | 115.010618807338 |
| 214 | -3.99962649725277 | 115.010769631716 |
| 215 | -3.99962902379703 | 115.010920669326 |
| 216 | -3.99962564259837 | 115.011071690591 |
| 217 | -3.99961635761744 | 115.011222465916 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| 218 | -3.99960118276282 | 115.011372766585 |
| 219 | -3.99958014098679 | 115.01152236476  |
| 220 | -3.99955326518958 | 115.01167103348  |
| 221 | -3.99952059550915 | 115.011818547566 |
| 222 | -3.99948218112716 | 115.011964682716 |
| 223 | -3.99943808117767 | 115.012109217309 |
| 224 | -3.99939580316126 | 115.01223445919  |
| 225 | -3.99934790908302 | 115.012357678995 |
| 226 | -3.99929449417973 | 115.012478628903 |
| 227 | -3.99923566815686 | 115.012597061962 |
| 228 | -3.99917154887701 | 115.012712739301 |
| 229 | -3.99910226686973 | 115.012825425623 |
| 230 | -3.99902796263223 | 115.012934894606 |
| 231 | -3.99894878751597 | 115.013040921706 |
| 232 | -3.99886101041753 | 115.01314251476  |
| 233 | -3.99877759092346 | 115.013247685046 |
| 234 | -3.99869867595919 | 115.013356247647 |
| 235 | -3.99862440339136 | 115.013468010468 |
| 236 | -3.99855490565323 | 115.013582777823 |
| 237 | -3.99849030340701 | 115.013700346854 |
| 238 | -3.99843071097949 | 115.013820512016 |
| 239 | -3.99792223824436 | 115.014979471339 |
| 240 | -3.99693405821561 | 115.017774584706 |
| 241 | -3.99604553809608 | 115.018668087337 |
| 242 | -3.99537712357636 | 115.01982871409  |
| 243 | -3.99456086402399 | 115.02130522208  |
| 244 | -3.99238472913221 | 115.020450611356 |
| 245 | -3.99237348391694 | 115.02044636633  |
| 246 | -3.99233586356762 | 115.020434555277 |
| 247 | -3.99229735249128 | 115.020426053197 |
| 248 | -3.99226448745803 | 115.020421514258 |
| 249 | -3.99223137689736 | 115.020419386037 |
| 250 | -3.99138240472511 | 115.020395928761 |
| 251 | -3.99136986195261 | 115.02039575624  |
| 252 | -3.99135996359055 | 115.020395864583 |
| 253 | -3.98940587575847 | 115.02043847475  |
| 254 | -3.98937143717593 | 115.020440536086 |
| 255 | -3.98933725715221 | 115.020445206792 |
| 256 | -3.98932198325829 | 115.020448159458 |
| 257 | -3.98742111125503 | 115.020849503915 |
| 258 | -3.98653745049079 | 115.020820146145 |
| 259 | -3.98652237228987 | 115.020819895019 |
| 260 | -3.98651343769803 | 115.020819983015 |
| 261 | -3.98532641099529 | 115.020843343765 |
| 262 | -3.98394255893705 | 115.020809668314 |
| 263 | -3.98393489868867 | 115.02080954618  |
| 264 | -3.98254904415767 | 115.020799212044 |
| 265 | -3.9784012341482  | 115.02061266447  |
| 266 | -3.97838083272152 | 115.020612206315 |
| 267 | -3.9783392916412  | 115.02061411059  |
| 268 | -3.97751594189375 | 115.020689749975 |
| 269 | -3.97653346568127 | 115.020612638585 |
| 270 | -3.97649793468055 | 115.020611245998 |
| 271 | -3.97648009936775 | 115.020611596462 |
| 272 | -3.97428196449533 | 115.020697996582 |
| 273 | -3.97396737920844 | 115.020678068983 |
| 274 | -3.97361911674385 | 115.02034338849  |
| 275 | -3.97359575831362 | 115.020322452146 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| 276 | -3.97358310826157 | 115.020312263129 |
| 277 | -3.97279515545512 | 115.019700636951 |
| 278 | -3.97276980427718 | 115.019682328837 |
| 279 | -3.97274324132749 | 115.019665811586 |
| 280 | -3.97273790591299 | 115.019662792142 |
| 281 | -3.97120319225549 | 115.018807952537 |
| 282 | -3.97115993931191 | 115.018786790053 |
| 283 | -3.96926565253834 | 115.017981771474 |
| 284 | -3.96868629433169 | 115.018943508103 |
| 285 | -3.96869165012951 | 115.01894598282  |
| 286 | -3.96872242121888 | 115.018959226464 |
| 287 | -3.97102244265612 | 115.019991585137 |
| 288 | -3.97213528315344 | 115.020616137357 |
| 289 | -3.97294249309853 | 115.021278590424 |
| 290 | -3.97294762327126 | 115.021282738434 |
| 291 | -3.97351703875245 | 115.021736287891 |
| 292 | -3.97354449577722 | 115.021756513198 |
| 293 | -3.97357340609802 | 115.021774617558 |
| 294 | -3.97360839600023 | 115.021792753345 |
| 295 | -3.97364483954573 | 115.021807784168 |
| 296 | -3.97368246069331 | 115.021819595446 |
| 297 | -3.97372097170623 | 115.021828096936 |
| 298 | -3.97376007948555 | 115.021833224514 |
| 299 | -3.97379948827616 | 115.021834937472 |
| 300 | -3.9738152957759  | 115.02183466212  |
| 301 | -3.97561128121283 | 115.021772108265 |
| 302 | -3.97561634396104 | 115.02177190353  |
| 303 | -3.976467512497   | 115.021732741947 |
| 304 | -3.97747211497269 | 115.021810709464 |
| 305 | -3.97750725171416 | 115.021812071514 |
| 306 | -3.97753914291055 | 115.021810950191 |
| 307 | -3.97836440891583 | 115.021752845944 |
| 308 | -3.98251822979062 | 115.021922589089 |
| 309 | -3.9825312332043  | 115.021922934356 |
| 310 | -3.98396556291732 | 115.02194042361  |
| 311 | -3.98529578224636 | 115.021949575244 |
| 312 | -3.98529978042243 | 115.021949585494 |
| 313 | -3.98651196396953 | 115.021944913235 |
| 314 | -3.987502479683   | 115.021970204811 |
| 315 | -3.98751407034039 | 115.021970353552 |
| 316 | -3.98755347810649 | 115.02196864056  |
| 317 | -3.98759258740544 | 115.021963513419 |
| 318 | -3.98760468301755 | 115.021961220223 |
| 319 | -3.98949939518516 | 115.021575309371 |
| 320 | -3.98950263014675 | 115.021734112319 |
| 321 | -3.98949703676985 | 115.02218434809  |
| 322 | -3.98949144224044 | 115.02263458488  |
| 323 | -3.98948584745831 | 115.023084820886 |
| 324 | -3.98948403245031 | 115.023230877782 |
| 325 | -3.98948025242563 | 115.023535057008 |
| 326 | -3.98947465804873 | 115.023985294144 |
| 327 | -3.98946906251497 | 115.024435530499 |
| 328 | -3.98946667023963 | 115.024628037646 |
| 329 | -3.98946349017326 | 115.024883863659 |
| 330 | -3.98944713997912 | 115.024885564693 |
| 331 | -3.98941825148016 | 115.024885208764 |
| 332 | -3.98898646471427 | 115.024879888604 |
| 333 | -3.98844800478775 | 115.024873252994 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| 334 | -3.987766182856   | 115.02486485107  |
| 335 | -3.98760961984571 | 115.024862921067 |
| 336 | -3.98760794154764 | 115.024997991903 |
| 337 | -3.98732025094891 | 115.024994446499 |
| 338 | -3.98715578360001 | 115.024992420064 |
| 339 | -3.98712837342964 | 115.02499208217  |
| 340 | -3.98687809592777 | 115.024988998355 |
| 341 | -3.98687081277024 | 115.024988908607 |
| 342 | -3.98679894597686 | 115.025100312169 |
| 343 | -3.9867846399009  | 115.025100443554 |
| 344 | -3.98671029474217 | 115.025211822404 |
| 345 | -3.9862823593925  | 115.025852937365 |
| 346 | -3.98614293346628 | 115.026062129422 |
| 347 | -3.9857653407649  | 115.026628660191 |
| 348 | -3.985622991513   | 115.02685896039  |
| 349 | -3.98699808270511 | 115.027762224651 |
| 350 | -3.98782004470329 | 115.028302150176 |
| 351 | -3.98655404938023 | 115.030162143525 |
| 352 | -3.98655197893748 | 115.030165185198 |
| 353 | -3.98580923673057 | 115.031256412454 |
| 354 | -3.98583419748952 | 115.031277032263 |
| 355 | -3.98613760045024 | 115.03152767045  |
| 356 | -3.98512395177329 | 115.03302673151  |
| 357 | -3.98523183594396 | 115.033101531185 |
| 358 | -3.986194709661   | 115.033769123047 |
| 359 | -3.9859563444058  | 115.034141606864 |
| 360 | -3.98595518059334 | 115.034143425556 |
| 361 | -3.98535948062041 | 115.035074296697 |
| 362 | -3.98535916264052 | 115.035074792623 |
| 363 | -3.98522626868629 | 115.035282460439 |
| 364 | -3.98523023473266 | 115.035285276198 |
| 365 | -3.98628241236182 | 115.036032130928 |
| 366 | -3.98623729767688 | 115.036095987307 |
| 367 | -3.9859782636759  | 115.036502419487 |
| 368 | -3.98561469876543 | 115.036711614276 |
| 369 | -3.98530909273922 | 115.036887460661 |
| 370 | -3.9851507942199  | 115.037065720557 |
| 371 | -3.98523025452204 | 115.037492941486 |
| 372 | -3.98548897710922 | 115.038883970383 |
| 373 | -3.98572391094677 | 115.04030558814  |
| 374 | -3.98572194989375 | 115.040314324026 |
| 375 | -3.98571861622062 | 115.040322637315 |
| 376 | -3.98571399350414 | 115.040330314434 |
| 377 | -3.98570820062613 | 115.040337159733 |
| 378 | -3.98570138635713 | 115.040342999099 |
| 379 | -3.98569372483782 | 115.040347680867 |
| 380 | -3.98568541199027 | 115.040351087533 |
| 381 | -3.985676659176   | 115.040353130366 |
| 382 | -3.98566871314506 | 115.0403537731   |
| 383 | -3.98566075449772 | 115.040353297675 |
| 384 | -3.98551658347962 | 115.040354812192 |
| 385 | -3.98551775853827 | 115.0405310908   |
| 386 | -3.98553367341115 | 115.041338010697 |
| 387 | -3.98553922208955 | 115.041619388941 |
| 388 | -3.98553260933231 | 115.041949863145 |
| 389 | -3.98554730714366 | 115.042029335133 |
| 390 | -3.98555046489927 | 115.042189415278 |
| 391 | -3.98556093088066 | 115.042720120611 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| 392 | -3.98429358503326 | 115.044478951233 |
| 393 | -3.98335818685038 | 115.04532033756  |
| 394 | -3.98250913109987 | 115.046768021568 |
| 395 | -3.98242935930437 | 115.046904038218 |
| 396 | -3.98207938348353 | 115.046694053387 |
| 397 | -3.98196782772861 | 115.046627119806 |
| 398 | -3.98157019601237 | 115.046388541077 |
| 399 | -3.98154495729835 | 115.046432678094 |
| 400 | -3.98073907862273 | 115.047915799531 |
| 401 | -3.97793210936957 | 115.054653011008 |
| 402 | -3.97694938323129 | 115.057176015804 |
| 403 | -3.98114545959067 | 115.059040613517 |
| 404 | -3.98408256485819 | 115.058125546485 |
| 405 | -3.98520141206577 | 115.05443314783  |
| 406 | -3.98522582473917 | 115.054435117962 |



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

## DAFTAR HADIR

RAPAT LAPORAN TEMUAN PKKPR PADA KAWASAN INDUSTRI JORONG  
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU

HARI/ TANGGAL : Kamis/ 6 Juni 2024  
TEMPAT : Ruang Kepala Dinas PM- PTSP Kab. Tanah Laut

| No. | Nama            | Jabatan                   | Instansi           | Tanda Tangan |
|-----|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | Masturi         | Kadisakerin               | Dtsakerin          | 1.           |
| 2.  | Ugi Purina      | keah-d TR                 | DPDPP              | 2.           |
| 3.  | Yanti Mudas     | Kabud. Tala               | DPRKPLH<br>DPRPTSP | 3.           |
| 4.  | Scidul Fitri    | Penata Ruang Mada         | DPUPM              | 4.           |
| 5.  | Ushra M.        | Pemuda Pertanahan Pertama | BNP-Tala           | 5.           |
| 6.  | FEROT           |                           | BPH TALA           | 6.           |
| 7.  | Taufikurrahman  | Perancang percau          | bagian Hukum       | 7.           |
| 8.  | Ruzaningsih     | keasid                    | DPRPTSP            | 8.           |
| 9.  | Emrohayat       | keasid PM                 | DPUPM              | 9.           |
| 10. | Mai             | Pedak                     | DPRKPLH            | 10.          |
| 11. | Buchi Andrian s | keasid PRPT               | bpmpro             | 11.          |
| 12. | Hamid sjo       | Sjt                       | .                  | 12.          |
| 13. |                 |                           |                    | 13.          |
| 14. |                 |                           |                    | 14.          |
| 15. |                 |                           |                    | 15.          |

Pembuat Daftar,

M. Noor Supiani

NIP. 19850404 201101 1 003

**NOTULEN RAPAT**  
**LAPORAN TEMUAN PKKPR PADA KAWASAN INDUSTRI JORONG**  
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut.

---

Hari : Kamis.  
Tanggal : 6 Juni 2024.  
Waktu : 09.00 s/d 11.00.  
Tempat : Kantor Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut.  
Notulis : M. Noor Supiani.

**I. Jalanya Rapat**

1. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Tanah Laut, Bapak Budi Andrian Sutanto, S.Sos, M.M selaku pimpinan rapat.
2. Dalam pertemuan ini pimpinan rapat memafarkan latar belakang diselenggarakannya kegiatan yaitu surat dari PT. Wahyu Putra Ramadhan Nomor 25/WPR-KI/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pelaporan Adanya Temuan PKKPR PT. Kawasan Industri Jorong
3. Berkenaan dengan hal tersebut dan dalam upaya proses penyelesaian adanya indikasi tumpang tindih lahan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha pada Kawasan Industri Jorong, maka perlu diadakannya rapat dalam rangka meminta masukan baik terkait informasi prosedur penerbitan KKPR maupun hal lain yang dianggap perlu.

Adapun Informasi dan masukan tersebut yaitu :

- **Bidang Tata Ruang** DPUPRP Kab. Tanah Laut yang diwakili Bapak Saidul Fitri menyampaikan bahwa : PKKPR milik PT. Kawasan Industri Jorong terbit secara otomatis oleh online Single Submission (OSS). Setelah melakukan analisis berdasarkan Pasal 181 Ayat 1 Huruf C bahwa secara tidak langsung Kementerian Investasi/ BKPM mengakui bahwa diatas lahan PKKPR PT Kawasan Industri Jorong sudah ada PKKPR lain yaitu PKKPR PT. Wahyu Putra Ramadhan. Terindikasi kemungkinan terbitnya PKKPR PT. Kawasan Industri Jorong hanya untuk sebagai tenant saja. PT. Kawasan Industri Jorong tidak dapat melakukan penguasaan lahan dan tidak dapat berproses di BPN dikarenakan PT. Wahyu Putra Ramadhan sudah memiliki PKKPR dan Pertimbangan Teknis Pertanahan serta Izin Usaha Kawasan Industri.
- **Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu** Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut Bapak Budi Andrian Sutanto menyampaikan bahwa : Kegiatan kawasan industri yang dilaksanakan oleh PT Wahyu Putra Ramadhan masuk dalam Proyek Strategis Nasional sehingga PKKPR nya masuk dalam kategori PKKPR Nonberusaha.
- **Kantor ATR/ BPN Tanah Laut** menyampaikan bahwa : Sampai dengan saat ini belum ada masuk permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari PT. Kawasan Industri Jorong di Kantor ATR/ BPN Tanah Laut, dan apabila memang nantinya diajukan maka akan secara otomatis tertolak karena dilahan yang sama telah ada PKKPR PT. Wahyu Putra Ramadhan yang sudah lengkap dengan Pertimbangan Teknis Pertanahannya.

- **Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu** Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut menyampaikan bahwa : Berdasarkan Informasi dari PT. Wahyu Putra Ramadhan bahwa PT. Kawasan Industri Jorong telah melakukan lobi-lobi dan promosi terhadap kawasan PKKPR nya kepada para investor baik dalam maupun luar negeri.
- **Administrator OSS** Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut Bapak Hamid Arip menyampaikan bahwa : Karena PKKPR PT Kawasan Industri Jorong terbit secara otomatis maka pemohon tidak dapat melakukan proses pembayaran PNPB sehingga secara otomatis pula sistem akan menolak ketika ada permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor ATR/ BPN. PKKPR PT Kawasan Industri Jorong dilakukan secara manual yang kemudian diintegrasikan oleh Kementerian Investasi/ BKPM ke dalam OSS sehingga oleh sitem tidak terbaca dan otomatis terbitlah PKKPR nya. Pemerintah Daerah dapat memberikan usulan kepada Kementerian Investasi/ BKPM untuk mencabut PKKPR PT. Kawasan Indsutri Jorong.
- **Kepala Bidang Penanaman Modal** Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut yang menyampaikan bahwa : Dalam OSS Kementerian Investasi/ BKPM memang sudah menyediakan mekanisme penyelesaian masalah, namun jika PKKPR PT. Kawasan Industri Jorong diusulkan dicabut maka seolah-olah Pemerintah Daerah mendukung kepada salah satu investor dan akan ada implikasi yang lain yang mungkin timbul, jadi ada baiknya permasalahan ini dilaporkan dulu ke Pemerintah Provinsi.
- **Bidang Tata Ruang** DPUPRP Kab. Tanah Laut menyampaikan bahwa : Terdapat perbedaan luasan antara yang tercantum dalam PKKPR yaitu seluas 384 Ha sedangkan pada lampiran titik koordinatnya setelah dioverlay hanya seluas  $\pm$  40 Ha.
- **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian** Kab. Tanah Laut menyampaikan bahwa : Dalam balasan menjawab surat dari PT. Wahyu Putra Ramadhan nanti perlu dijelaskan bahwa KKPR PT. Kawasan Industri Jorong itu terbit secara otomatis dan itu bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Diharapkan kepada PT. Wahyu Putra Ramadhan agar tetap fokus pada Kawasan Industrinya terutama dalam hal pembebasan lahan. Jangan sampai ketika adu data ternyata PT. Wahyu Putra Ramadhan yang sudah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) justru belum menyelesaikan pembebasan lahannya.
- **Bagian Hukum** Setda Kab. Tanah Laut yang diwakili Bapak Taufikurahman menyampaikan bahwa : Secara hukum terdapat kecacatan pada PKKPR yang dimiliki PT. Kawasan Industri Jorong, dimana terdapat perbedaan luasan antara PKKPR dan lampirannya. Hal ini perlu disampaikan atau dikoordinasikan dengan penerbit PKKPR dalam hal ini Kementerian Investasi/ BKPM.
- **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian** Kab. Tanah Laut menyampaikan bahwa : Disarankan kepada PT. Wahyu Putra Ramadhan untuk bisa berkomunikasi dengan PT. Kawasan Industri Jorong agar bisa terjalin kerjasama dalam menjalankan usaha Kawasan Industri Jorong.




## II. Kesimpulan


1. Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang PT. Kawasan Industri Jorong diterbitkan oleh Kementerian Investasi/ BKPM Pusat melalui Online Single Submission (OSS) dengan mekanisme sesuai Pasal 181 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa Lokasi usaha dan / atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan akan digunakan oleh pelaku usaha, sehingga proses penerbitannya tidak melalui validasi dari daerah.
2. PKKPR yang terbit terdapat perbedaan luasan, di dalam PKKPR yang terbit seluas 384 Ha, sedangkan luasan setelah dioverlay dengan tabel koordinat yang dimohonkan ternyata hanya seluas ± 40 Ha.
3. PT. Wahyu Putra Ramadhan tetap fokus dalam pembangunan infrastruktur, melakukan pembebasan lahan, melaporkan perolehan lahan pada kantor ATR/ BPN Tanah Laut dan Pemerintah Daerah serta tetap melakukan tahapan-tahapan pembangunan kawasan industri lainnya.
4. Pemerintah Daerah akan melaporkan dan mengkonsultasikan adanya permasalahan ini kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Investasi/ BKPM.

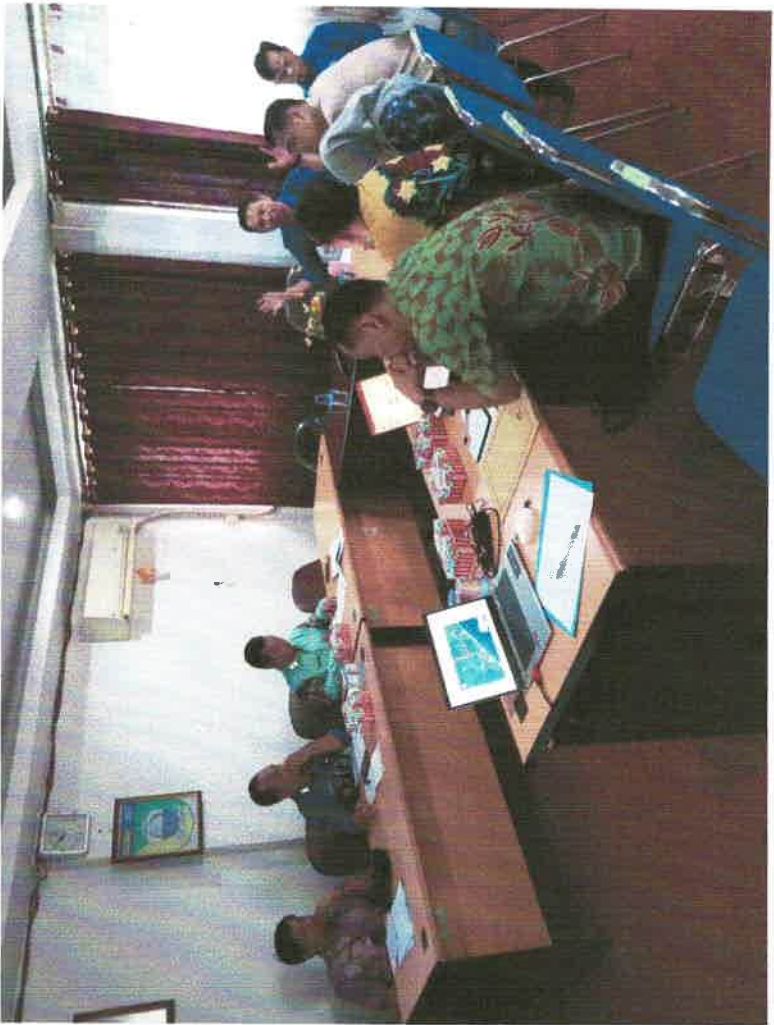
Pelaihari, 6 Juni 2024

Mengetahui :  
Kabid PNP Tertentu,

  
BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos  
NIP. 19760218 201101 1 004

Notulis,

  
M. NOOR SUPIANI  
NIP. 19850404 201101 1 003











**BERITA ACARA**  
**RAPAT LAPORAN TEMUAN PKKPR PADA KAWASAN INDUSTRI JORONG**  
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut.

Menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh PT. Wahyu Putra Ramadhan Nomor 25/WPR-KI/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pelaporan Adanya Temuan PKKPR PT. Kawasan Industri Jorong, pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan Rapat Laporan Temuan PKKPR Pada Kawasan Industri Jorong, menyepakati hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang PT. Kawasan Industri Jorong diterbitkan oleh Kementerian Investasi/ BKPM Pusat melalui Online Single Submission (OSS) dengan mekanisme sesuai Pasal 181 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan proses penerbitannya tidak melalui validasi dari daerah.
2. PKKPR yang terbit atas nama PT. Kawasan Industri Jorong terdapat perbedaan luasan, di dalam PKKPR yang terbit seluas 384 Ha, sedangkan luasan setelah dioverlay dengan tabel koordinat yang dimohonkan ternyata hanya seluas  $\pm$  40 Ha.
3. PT. Wahyu Putra Ramadhan agar tetap fokus dalam pembangunan infrastruktur, melakukan pembebasan lahan, melaporkan perolehan lahan pada kantor ATR/ BPN Tanah Laut dan Pemerintah Daerah serta tetap melakukan tahapan-tahapan pembangunan kawasan industri lainnya
4. Pemerintah Daerah akan melaporkan dan mengkonsultasikan adanya permasalahan ini kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Investasi/ BKPM.

Demikian berita acara Rapat Laporan Temuan PKKPR Pada Kawasan Industri Jorong ini dibuat dan ditandatangani SKPD/ Instansi teknis terkait :

| No. | Nama                             | Jabatan  | Tanda Tangan   |
|-----|----------------------------------|--|--|
| 1.  | Masturi, S.STP, M.Si             | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut.           | 1.  |
| 2.  | Yanti Mondes, ST, MS             | Kabid. Tata Lingkungan Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut.                   | 2.  |
| 3.  | Ulil Amri Bahtiar, ST, MP        | Kabid. Tata Ruang Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut.                         | 3.  |
| 4.  | Budi Andrian Sutanto, S.Sos, M.M | Kabid. Perizinan dan Non Perizinan Tertentu DPMPTSP Kab. Tanah Laut.   | 4.  |
| 5.  | H. Suriansyah, S. Sos            | Kabid. Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha DPMPTSP Kab. Tanah Laut. | 5.  |
| 6.  | Emrohayat, S.Pt                  | Kabid. Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Tanah Laut.                        | 6.  |

| No. | Nama                   | Jabatan   | Tanda Tangan  |
|-----|------------------------|---|---|
| 7.  | Saidul Fitri, S.Tr, MT | Penata Ruang Muda Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut.                  | 7.   |
| 8.  | Taufikurrahman, SH     | Perancang Perundang - undangan Bagian Hukum Setda Tanah Laut.   | 8.   |
| 9.  | Mai Puji Lestari, ST   | Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut. | 9.   |
| 10. | Ushfia. M              | Penata Pertanahan Pertama Kantor ATR/BPN Tanah Laut             | 10.  |
| 11. | Ferdy                  | Penata Pertanahan Kantor ATR/BPN Tanah Laut                     | 11.  |
| 12. | Hamid Arip, A.Md       | Pelaksana Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut/ Admin OSS               | 12.  |





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

Pelaihari, 10 Juni 2024

Nomor : 500.16.7.4.7/183/PNPT/2024  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : Informasi PKKPR pada Kawasan Industri Jorong

Kepada Yth.  
PT. Wahyu Putra Ramadhan  
di –

Tempat

Sehubungan surat PT. Wahyu Putra Ramadhan Nomor 25/WPR-KI/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pelaporan Adanya Temuan PKKPR PT. Kawasan Industri Jorong, maka dalam rangka tindak lanjut pelaporan temuan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Laut telah melaksanakan rapat koordinasi bersama SKPD/ Instansi terkait dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang PT. Kawasan Industri Jorong diterbitkan oleh Kementerian Investasi/ BKPM Pusat melalui Online Single Submission (OSS) dengan mekanisme sesuai Pasal 181 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan proses penerbitannya tidak melalui validasi dari daerah.
2. PKKPR yang terbit atas nama PT. Kawasan Industri Jorong terdapat perbedaan luasan, di dalam PKKPR yang terbit seluas 384 Ha, sedangkan luasan setelah dioverlay dengan tabel koordinat yang dimohonkan ternyata hanya seluas  $\pm$  40 Ha.
3. PT. Wahyu Putra Ramadhan agar tetap fokus dalam pembangunan infrastruktur, melakukan pembebasan lahan, melaporkan perolehan lahan pada kantor ATR/ BPN Tanah Laut dan Pemerintah Daerah serta tetap melakukan tahapan-tahapan pembangunan kawasan industri lainnya.
4. Pemerintah Daerah akan melaporkan dan mengkonsultasikan adanya permasalahan ini kepada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Investasi/ BKPM.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas,

**H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd. M.AP**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19710224 199702 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

Nomor : 500.16.7.2/181/PNPT  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat  
KKPR Nonberusaha.

Pelaihari, 5 Juni 2024

Kepada Yth.

.....  
.....

Di-

Tempat

Sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Berdasarkan Pasal 41 Permen 13/2021, petunjuk teknis pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha ditetapkan oleh Menteri dan terdapat muatan yang memerlukan pendetailan, diantaranya pengaturan mengenai KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha yang berdasarkan Pasal 70 Permen 13/2021, KKPR dilaksanakan secara non-elektronik dalam hal kondisi sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk berhadir dalam rangka membahas hal tersebut dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Juni 2024

Waktu : 11.00 Wita – selesai

Tempat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. P/t. Kepala Dinas  
Sekretaris,

**IRMA ROSANTI, S.Sos, M.I.Kom**  
NIP. 19730225 20064 2 006

Lampiran

Surat No : 500.16.7.2/181/PNPT

Perihal : Undangan Rapat Laporan Temuan PKKPR pada Kawasan Industri Jorong

Daftar undang :

1. Kantor ATR/ BPN Kab. Tanah Laut.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut
3. Bidang Tata Ruang Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut.
4. Bidang Tata Lingkungan Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP**

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT KKPR NON BERUSAHA**  
**BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU**

HARI/ TANGGAL : Kamis/ 6 Juni 2024  
 TEMPAT : Ruang Kepala Dinas PM- PTSP Kab. Tanah Laut

| No. | Nama            | Jabatan                 | Instansi   | Tanda Tangan |
|-----|-----------------|-------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Masturi         | Kadisackonin            | Disackonin | 1.           |
| 2.  | Ulil Aun B.     | keah-d TA.              | DPUPRP-    | 2.           |
| 3.  | Xanti Mandos    | Kabud. Talang           | DPRIKPLH   | 3.           |
| 4.  | Saidul Fitri    | Penetta Ruang Mudo      | DPUPRP     | 4.           |
| 5.  | Ushor M.        | Peneta Perikanan Perair | BPN Tala   | 5.           |
| 6.  | FERRY           |                         | BPN TALA   | 6.           |
| 7.  | Taufik Komandan | perancang perum         | bag. Hukum | 7.           |
| 8.  | Amirahyah       | keabs                   | DPUPRP     | 8.           |
| 9.  | Emrohayf        | Kabid. PM               | DPUPRP     | 9.           |
| 10. | Mai             | Pedal                   | DPRIKPLH   | 10.          |
| 11. | Budi Andrian    | Kabid. PRPT             | DPUPRP     | 11.          |
| 12. | Hamid Riz       | Staf                    | u          | 12.          |
| 13. |                 |                         |            | 13.          |
| 14. |                 |                         |            | 14.          |
| 15. |                 |                         |            | 15.          |

Pembuat Daftar,

M. Noor Supiani

NIP. 19850404 201101 1 003







**NOTULEN RAPAT**  
**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)**  
**NON BERUSAHA**

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut.

Hari : Kamis.  
Tanggal : 6 Juni 2024.  
Waktu : 11.00 s/d 13.00.  
Tempat : Kantor Dinas PM & PTSP Kab. Tanah Laut.  
Notulis : Muhammad Noor Supiani.

**I. Jalanya Rapat**

1. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Tanah Laut, Bapak Budi Andrian Sutanto, S.Sos, M.M selaku pimpinan rapat.
2. Dalam pertemuan ini pimpinan rapat memafarkan latar belakang diselenggarakannya kegiatan yaitu telah ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
3. Berkenaan dengan hal tersebut dan telah terbitnya petunjuk teknis pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan non berusaha, maka perlu diadakannya rapat dalam rangka meminta masukan baik terkait informasi prosedur penerbitan KKPR maupun hal lain yang dianggap perlu.

Adapun Informasi dan masukan tersebut yaitu :

- **Bidang Tata Ruang** DPUPRP Kab. Tanah Laut yang diwakili Bapak Saidul Fitri menyampaikan bahwa : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non Berusaha dapat diajukan oleh perorangan baik individu atau organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, Korporasi seperti PT, yayasan atau koperasi, dan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD seperti kegiatan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum atau bukan untuk kepentingan umum berupa pembangunan atau perubahan gedung, pembangunan infrastruktur, atau kegiatan lain yang membutuhkan ruang.
- **Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu** Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut Bapak Budi Andrian Sutanto menyampaikan bahwa : Salah satu contoh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non Berusaha adalah kegiatan kawasan industri yang dilaksanakan oleh PT Wahyu Putra Ramadhan karena kegiatan usahanya masuk dalam Proyek Strategis Nasional sehingga KKPR nya masuk dalam kategori KKPR Nonberusaha.
- **Kantor ATR/ BPN Tanah Laut** menyampaikan bahwa : Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan kawasan industri jorong oleh PT. Wahyu Putra Ramadhan telah diterbitkan Kantor ATR/ BPN Tanah Laut, dengan demikian maka secara otomatis permohonan baru pertimbangan teknis pertanahan untuk kegiatan pada kawasan industri jorong akan tertolak oleh sistem karena dilahan yang sama telah ada KKPR yang sudah terbit.

- ***Bidang Tata Ruang*** DPUPRP Kab. Tanah Laut yang diwakili Bapak Saidul Fitri menyampaikan bahwa : dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha berisi paling sedikit berupa :
  1. Koordinat lokasi.
  2. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang (dalam satuan m<sup>2</sup> atau ha).
  3. Informasi penguasaan tanah.
  4. Informasi jenis kegiatan.
  5. Rencana jumlah lantai bangunan.
  6. Rencana luas lantai bangunan.
  7. Rencana teknis bangunan dan / atau rencana induk kawasan.
- ***Administrator OSS*** Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut Bapak Hamid Arip menyampaikan bahwa : Dalam hal untuk penyelenggaraan pelayanan KKPR Nonberusaha di Daerah maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Petunjuk teknis terkait pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha secara non-elektronik Nomor 13 / Juknis- PF.01/XII/ 2023 Tanggal 21 Desember 2023.
- ***Kepala Bidang Tata Lingkungan*** Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut yang menyampaikan bahwa : Dalam proses penilaian dokumen lingkungan oleh Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut masih berpatokan pada Surat Keterangan Tata Ruang sehingga diharapkan Surat Keterangan Tata Ruang tetap ada, paling tidak Pertimbangan Teknis Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut harus tetap ada.
- ***Bidang Tata Ruang*** DPUPRP Kab. Tanah Laut menyampaikan bahwa : Adanya produk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dalam hal pelayanan terhadap pemanfaatan ruang.
- ***Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu*** Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut Bapak Budi Andrian Sutanto menyampaikan bahwa : KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri, namun berdasarkan Pasal 70 Permen 13/2021, KKPR dilaksanakan secara non-elektronik dalam hal kondisi sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka perlu dipahaminya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha secara Non-Elektronik.
- ***Kantor ATR/ BPN Tanah Laut*** menyampaikan bahwa : Dalam penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan, Kantor ATR/ BPN Tanah Laut juga masih mengacu pada Pertimbangan Teknis Tata Ruang sehingga diharapkan Pertimbangan Teknis Tata Ruang dari Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut terbit terlebih dahulu sebelum Pertimbangan Teknis Pertanahan kami terbitkan.

## II. Kesimpulan

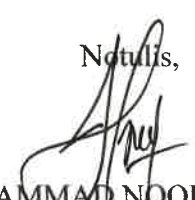
1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Petunjuk teknis terkait pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha secara non-elektronik Nomor 13 / Juknis- PF.01/XII/ 2023 Tanggal 21 Desember 2023 untuk sebagai acuan dalam pelayanan KKPR Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Pertimbangan Teknis Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut diharapkan terbit lebih dulu karena diperlukan sebagai acuan dalam verifikasi dokumen lingkungan oleh Dinas PRKPLH Kabupaten Tanah Laut dan sebagai acuan oleh Kantor ATR/ BPN Tanah Laut dalam penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan.
3. Penyelenggaraan pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Nonberusaha secara non-elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah akan diselenggarakan secepatnya.

Pelaihari, 6 Juni 2024

Mengetahui :  
Kabid PNP Tertentu,

  
BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos  
NIP. 19760218 201101 1 004

Notulis,

  
MUHAMMAD NOOR SUPIANI  
NIP. 19850404 201101 1 003